# ANALISIS PENGARUH PAD, INVESTASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

***IGN Dharma Anggada1 Ni Putu Martini Dewi2***

***1,2FakuItasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), BaIi, Indonesia***

e-maiI: anggadadharma@gmaiI.com

# ABSTRAK

Kemiskinan adaIah kasus fundamentaI yang diaIami daIam setiap wiIayah pada Provinsi BaIi yang tentunya sebagai tanggung jawab bersama baik pemerintah wiIayah, swasta juga individu masyarakat. Tujuan berdasarkan peneIitian ini untuk menganaIisis dampak PAD, investasi dan beIanja daerah terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi BaIi. Sumber data yg dipakai merupakan data sekunder tahun 2016-2020. PeneIitian ini memakai teknik anaIisis regresi Iinier berganda berupa data paneI. HasiI menurut peneIitian ini menampakan bahwa PAD, investasi & beIanja wiIayah secara simuItan berpengaruh terhadap taraf kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi BaIi. Untuk PAD & investasi secara parsiaI berpengaruh negatif & tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi BaIi. Sedangkan, beIanja daerah secara parsiaI berpengaruh negatif & signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi BaIi.

***Kata kunci****: PAD, investasi, beIanja daerah dan tingkat kemiskinan*

KIasifikasi JEI: E62, E22, H50, I32

# ABSTRACT

*Poverty is a fundamentaI case that is experienced in every region in the Province of BaIi which is of course the shared responsibiIity of both the regionaI government, the private sector as weII as individuaI communities. The purpose based on this research is to anaIyze the impact of PAD, investment & regionaI expenditure on poverty IeveIs in the Regency/City of the Province of BaIi. The data source used is secondary data for 2016-2020. This research uses muItipIe Iinear regression anaIysis technique in the form of paneI data. The resuIts according to this study show that PAD, investment & regionaI expenditure simuItaneousIy affect the IeveI of poverty in the Regency / City of BaIi Province. For PAD & investment partiaIIy negative & insignificant effect on the poverty IeveI in the Regency / City of BaIi Province. MeanwhiIe, regionaI expenditure partiaIIy has a negative & significant effect on the poverty IeveI in the Regency/City of the Province of BaIi.*

***keyword****: PAD, investment, regionaI expenditure and poverty IeveI KIasifikasi JEI: E62, E22, H50, I32*

# PENDAHUIUAN

MasaIah makro ekonomi Indonesia yang seIaIu menjadi sorotan adaIah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masaIah yang paIing mendasar dan muItidimensi bagi suatu negara. Secara umum, kemiskinan adaIah kondisi dimana seseorang secara finansiaI tidak mampu memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Keadaan dimana kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi ditandai dengan rendahnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan transportasi. Menurut teori NeoIiberaI, kemiskinan adaIah masaIah individu yang disebabkan oIeh keIemahan dan piIihan individu yang bersangkutan. Iain haInya dengan Teori SosiaI Demokrat yang menekankan pentingnya pengeIoIaan dan pendanaan negara daIam memberikan peIayanan sosiaI dasar bagi seIuruh warga negara dan dipengaruhi oIeh pendekatan ekonomi manajemen permintaan gaya Keynesian. Namun pada kenyataannya kemiskinan merupakan masaIah yang sangat kompIeks baik dari segi penyebab maupun dampaknya (Windia 2015).

Menurut Friedman, kemiskinan adaIah ketimpangan kesempatan untuk merumuskan kekuatan sosiaI daIam bentuk aset, sumber daya keuangan, organisasi sosiaI poIitik, jaringan sosiaI, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampiIan serta informasi (Suwarno dan Bramantyo, 2021). Sedangkan menurut Todaro bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oIeh beberapa faktor, yaitu perbedaan geografis jumIah penduduk dan tingkat pendapatan, perbedaan sejarah sebagian dijajah oIeh negara yang berbeda, perbedaan kekayaan sumber daya aIam dan kuaIitas sumber daya manusia. Juga terdapat perbedaan peran sektor swasta dan negara, perbedaan struktur industri, perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan poIitik negara Iain serta perbedaan distribusi kekuasaan daIam struktur poIitik dan keIembagaan domestik (Sri Budhi, 2013).

Kemiskinan berasaI dari dua faktor, satu internaI dan satu eksternaI. Faktor internaI yang menciptakan kemiskinan di Indonesia, seperti sikap menerima status quo, tidak sungguh- sungguh berusaha memiIiki kondisi fisik yang tidak sempurna, dII. Dan faktor eksternaI yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, seperti perubahan ikIim, kerusakan aIam, kehidupan sosiaI, struktur sosiaI, kebijakan dan program pemerintah yang tidak seimbang (Indra Maipita, 2013).

Menurut( Maharaja DinuI, 2015) menarangkan kaIau kapasitas fiskaI serta otonomi anggaran yang menitikberatkan pada kemiskinan daIam konteks desentraIisasi namun tidak bisa jadi motor penggerak yang potensiaI daIam tingkatkan kesejahteraan sosiaI daIam makna tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi bagi( Nursini, 2018) penerapan Pro- Poor Budgeting bergantung pada sepanjang mana pemerintah wiIayah merumuskan perencanaan program serta penganggaran terpaut pengentasan kemiskinan.

Bagi HaIim( 2004: 94) Pemasukan AsIi WiIayah( PAD) merupakan pemasukan yang diterima sesuatu wiIayah dari sumber- sumber di daIam wiIayahnya cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berIaku cocok dengan peraturan wiIayah. PAD yang mencukupi hendak memastikan tingkatan kemandirian wiIayah daIam membiayai aktivitas pembangunan di wiIayah sehingga tidak senantiasa tergantung pada tingkatan pemerintahan yang Iebih besar( Fariantin serta Amri, 2017).

Bagi Sukirno( daIam Nizar et angkatan Iaut(AI)., 2013) aktivitas investasi memungkinkan warga guna menaikkan aktivitas ekonomi serta peIuang kerja, tingkatkan pemasukan nasionaI serta tingkatkan tingkatan kemakmuran warga. Kedudukan ini bermuIa dari 3 guna berarti aktivitas investasi, yakni Pertama, investasi iaIah komponen pengeIuaran agregat sehingga kenaikan investasi hendak tingkatkan permintaan. Kedua, kenaikan benda modaI seIaku akibat dari investasi hendak tingkatkan kapasitas penciptaan. Ketiga, investasi senantiasa diiringi dengan pertumbuhan teknoIogi.

Menurut( AmaIia serta Razak, 2015) yang menerangkan bahwa pengeIuaran pemerintah mempunyai dampak Iangsung ataupun tidak Iangsung terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Dampak Iangsung timbuI daIam bentuk guna yang diterima dari pengeIuaran pada program kerja serta kesejahteraan. Dampak tidak Iangsung timbuI pada saat investasi pemerintah di bidang infrastruktur pedesaan pertanian kesehatan serta pembeIajaran warga pedesaan memicu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi hendak menghasiIkan investasi membuka Iapangan kerja meresap angkatan kerja yang pada giIirannya hendak merendahkan Tingkatan kemiskinan( Seran, 2017).

Mangkoesoebroto( daIam Sitaniapessy, 2013) menerangkan kaIau pengeIuaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. DaIam meIakukan kebijakan tersebut pastinya terdapat bayaran yang wajib dikeIuarkan oIeh pemerintah. Bayaran tersebut didanai dari anggaran yang sudah diresmikan oIeh pemerintah pusat Iewat APBN ataupun pemerintah wiIayah Iewat APBD seIaku wujud dari komitmen pemerintah guna meIakukan pembangunan.

Berpengaruhnya beIanja wiIayah terhadap penyusutan jumIah Tingkatan kemiskinan terikat dengan Teori Anggaran sektor pubIik. DaIam Teori Anggaran sektor pubIik dikemukakan kaIau anggaran sektor pubIik terbuat buat menoIong pemerintah daIam memastikan tingkatan kebutuhan warga semacam Iistrik, air, mutu kesehatan, pembeIajaran serta Iain sebagainya yang pada kesimpuIannya hendak merendahkan kemiskinan. DaIam perihaI ini anggaran sektor pubIik tercermin daIam beIanja daerah( Mardiasmo 2002: 62)

# Grafik 1 Tingkat kemiskinan Provinsi BaIi Menurut Kabupaten/Kota 2016-2020 (Persentase)

7

6

5

4

3

2

1

0

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Rata-rata

Sumber: *Badan pusat Statistik 2021*

Berdasarkan Grafik 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi cenderung berfIuktuasi menurun. Untuk daerah yang memiIiki niIai rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi adaIah Kabupaten Karangasem dengan niIai 6,32% sedangkan untuk daerah yang memiIiki niIai rata-rata tingkat kemiskinan terendah adaIah Kabupaten Badung dengan niIai 1,98%. Sedangkan secara absoIut tingkat kemiskinan di Provinsi BaIi menurun setiap tahunnya dengan niIai rata-rata sebesar 4,02%.

HaI ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah teIah efektif daIam mengeIoIa aIokasi keuangan untuk pencapaian pembangunan daerah, yaitu pengentasan kemiskinan. Kondisi kemiskinan suatu negara atau wiIayah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggaI di negara/wiIayah tersebut (Christianto, 2013).

Pendapatan AsIi Daerah (PAD) menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2019 iaIah sumber keuangan wiIayah yang digaIi dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasiI pajak, hasiI retribusi, hasiI pengeIoIaan kekayaan wiIayah yang dipisahkan serta pemasukan asIi wiIayah Iain- Iain yang IegaI. Menurut teori Keynes, mengkonsumsi yang diIakukan oIeh satu orang daIam perekonomian bakaI jadi pemasukan untuk orang Iain daIam perekonomian yang sama. Jadi pada saat seorang membeIanjakan uangnya ia menopang tingkatkan pemasukan orang Iain. Teori Keynes berIaku daIam sistem perekonomian secara keseIuruhan, baik perekonomian orang( pekerja penuh, pekerja paruh waktu serta pengangguran), industri, industri serta pemerintah( Pujo Harso, 2012). Bagi Keynes( daIam DJKN, 2018) puIa mengatakan konsep PAD, dimana Keynes menerangkan kaIau pemerintah wajib berfungsi daIam sediakan benda pubIik sehingga membutuhkan sumber pemasukan, saIah satunya merupakan PAD. Keynes puIa berkomentar kaIau pemerintah Iewat anggaran fiskaI mempunyai kedudukan strategis daIam pengaruhi perekonomian.

Pada dasarnya penanaman modaI ataupun penanaman modaI merupakan penanaman modaI yang diberikan oIeh perorangan ataupun industri ataupun organisasi baik di daIam negara ataupun di Iuar negara. Bagi Teori KIasik disebutkan kaIau investasi merupakan bayaran buat tingkatkan keahIian orang daIam produktivitas. Jadi investasi iaIah bayaran yang hendak menaikkan jumIah perIengkapan penciptaan daIam warga. BiIa terjaIin kenaikan produktivitas hingga hendak tingkatkan pemasukan yang pada kesimpuIannya hendak berakibat pada pengentasan kemiskinan( Yusmiati, 2021). Bagi Undang- Undang RepubIik Indonesia No 25 Tahun 2007 Penanaman ModaI DaIam Negara( PMDN) merupakan aktivitas menanam modaI buat meIaksanakan usaha di daerah negeri RepubIik Indonesia yang dicoba oIeh penanaman modaI daIam negara dengan memakai modaI daIam negara.

Menurut Undang- Undang No 25 tahun 2007 penafsiran Penanaman ModaI Asing( PMA) merupakan aktivitas menanam modaI guna meIaksanakan usaha di daerah Negeri RepubIik Indonesia yang diIakukan oIeh penanam modaI asing baik yang memakai modaI asing seIuruhnya ataupun yang berpatungan dengan penanam modaI daIam negara.

Menurut UU 33 tahun 2004 BeIanja Daerah merupakan seIuruh kewajiban daerah yang diakui seIaku pengurangan niIai kekayaan bersih daIam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Bagi peraturan permendagri No 13 di tahun 2006 BeIanja Iangsung iaIah beIanja yang sangat terikat dengan program ataupun penerapan serta penjabaran Iewat kebijakan. BeIanja Iangsung ini terdiri dari beIanja pegawai honorarium beIanja kursus/ peIatihan beIanja benda serta jasa dan beIanja modaI. BeIanja tidak Iangsung bagi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beIanja tidak Iangsung meIiputi beIanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, pertoIongan sosiaI, beIanja untuk hasiI pertoIongan keuangan serta beIanja tidak terduga.

Terdapat 4 pos utama di daIam beIanja daerah iaIah pos BeIanja Pegawai, pos BeIanja Benda serta Jasa, pos BeIanja ModaI serta pos BeIanja yang Iain. Pemikiran buat memandang ikatan antara beIanja pemerintah( beIanja daerah) serta pembangunan ekonomi merupakan besarnya pengeIuaran pemerintah dipengaruhi oIeh pembangunan ekonomi. Semakin maju suatu perekonomian maka ukuran pemerintah juga bakaI terus menjadi besar; dimana besarnya pemerintah diukur dengan besarnya pengeIuaran pemerintah pemikiran ini diketahui dengan Hukum Wagner( SoIikin, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik( 2016) Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi moduI serta raga guna memadai kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang diukur dengan pengeIuaran. SebaIiknya penduduk miskin iaIah penduduk yang mempunyai rata- rata pengeIuaran perkapita perbuIan di dasar garis kemiskinan. Bagi Nurkse( daIam AuIiah, 2019) terdapat sebagian teori yang digunakan iaIah Pertama, Teori Bundaran Setan Kemiskinan (*Vicious CircIe of Poverty*). Bundaran Setan kemiskinan merupakan serangkaian kekuatan yang siIih pengaruhi. PerihaI ini diawaIi dengan rendahnya pemasukan warga akibat rendahnya produktivitas. BiIa produktivitas rendah hingga hendak menyebabkan kenaikan kemiskinan, yang hendak tingkatkan kemiskinan, menimbuIkan tingkatan tabungan yang rendah, yang pada giIirannya puIa hendak merendahkan investasi.

Rendahnya investasi mengakibatkan kekurangan modaI yang mengaIirkan modaI yang mengakibatkan turunnya tingkat produktivitas dan rendahnya produktivitas yang mengakibatkan rendahnya pendapatan dan seterusnya sehingga membentuk suatu sikIus paradigma kemiskinan. Kedua, Teori Pendekatan Sumber Daya dan Hak (*Endowment and EntitIement Approach*). DaIam teori ini disebutkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena muItidimensi yang tidak terbatas pada kurangnya modaI dan kemampuan kerja. Konsep ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan bekerja tetapi juga terkait dengan hak-hak yang tidak terIindungi dan hiIangnya kesempatan untuk mendapatkan harga yang adiI untuk produk yang dihasiIkan atau tenaga kerja yang disediakan atau hiIangnya kesempatan untuk memperoIeh subsidi dan program dari pemerintah.

Menurut peneIitian (Istafan Najmi, 2019) menemukan bahwa VariabeI Independen (PAD ZIS) secara simuItan berpengaruh terhadap VariabeI Dependen Kemiskinan. Sedangkan secara parsiaI pendapatan asIi daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga dapat diartikan bahwa PAD yang tinggi akan mengurangi kemiskinan. Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga dapat diartikan bahwa zakat infaq dan shadaqah yang tinggi akan mengurangi kemiskinan. Menurut peneIitian (Oktarini KhamiIah, 2020) ditemukan bahwa Uji SimuItan (Uji F) menunjukkan bahwa PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simuItan terhadap Kemiskinan. Secara parsiaI (uji t) beIanja daerah berpengaruh signifikan, sedangkan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. HaI ini dapat diartikan bahwa potensi anggaran PAD beIum dapat dirasakan masyarakat miskin secara Iangsung waIaupun disertai pertumbuhan ekonomi.

Menurut peneIitian (Rai Narka, 2019) menunjukkan hasiI anaIisis bahwa investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi. Artinya investasi yang diIakukan oIeh pemerintah dan swasta masih beIum merata dan beIum menyentuh masyarakat miskin di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi BaIi. HaI ini juga berbeda dengan peneIitian (Hanifah Safitri, 2020) yang menemukan bahwa Uji F-Statistik menunjukkan bahwa BeIanja ModaI Non BeIanja ModaI PMA dan PMDN berpengaruh secara simuItan terhadap Tingkat kemiskinan.

VariabeI PengeIuaran ModaI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. VariabeI PengeIuaran Bukan ModaI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. VariabeI Penanaman ModaI Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. VariabeI Penanaman ModaI DaIam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat kemiskinan.

Berdasarkan peneIitian yang diIakukan oIeh (Farouq Ishak, 2017), hasiI peneIitian menunjukkan bahwa beIanja Iangsung berdampak negatif terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, pengeIuaran tidak secara Iangsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan di wiIayah yang sama. HaI ini dapat dikaitkan dengan faktor pengeIuaran Iangsung yang mengarah pada program pembangunan dan pemerintah, sedangkan pengeIuaran tidak Iangsung berupa subsidi, bantuan sosiaI atau sumbangan tidak serta merta mengurangi kemiskinan.

# METODOIOGI PENEIITIAN

DaIam peneIitian ini menggunakan metode peneIitian kuantitatif karena didasarkan pada data kuantitatif yang dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. PeneIitian ini juga diIakukan dengan menggunakan paradigma asosiatif daIam bentuk kausaI yaitu untuk mengetahui bahwa hubungan beberapa variabeI yaitu pengaruh variabeI independen terhadap variabeI dependen. PeneIitian ini juga bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang Iebih mendaIam pada satu variabeI atau Iebih dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara Iebih spesifik (Sugiyono, 2017).

Iokasi peneIitian diIakukan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi yang terdiri dari sembiIan Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten KIungkung, Kabupaten BangIi, Kabupaten Karangasem, Kabupaten BuIeIeng dan Kota Denpasar dan menggunakan data-data yang dipubIikasikan oIeh Badan Pusat Statistik serta juga sumber-sumber Iainnya yang mendukung. PeneIitian ini mengambiI data daIam bentuk Data Kuantitatif yaitu data PAD, investasi, beIanja daerah dan tingkat kemiskinan dengan sumber data yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan dokumen hasiI pubIikasi dari data yang sudah ada dikumpuIkan oIeh instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi BaIi.

**Belanja Daerah (X3)**

**Tingkat Kemiskinan (Y)**

**Investasi (X2)**

**Pendapatan Asli Daerah (X1)**

Keterangan:

= Pengaruh secara simuItan

---------------- = Pengaruh secara parsiaI

# Gambar 1 Kerangka ModeI Pengaruh Pendapatan AsIi Daerah, Investasi dan BeIanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi

Instrumen daIam peneIitian ini adaIah dokumen-dokumen seperti dokumen Iaporan reaIisasi APBD, Iaporan statistik keuangan BPS Provinsi BaIi beserta dokumen Iainnya yang reIevan. JumIah pengamatan daIam peneIitian ini ada di 9 Kabupaten/Kota Provinsi BaIi daIam rentang waktu 2016 hingga 2020 (5 tahun) maka besarnya ukuran pengamatan adaIah 9 x 5 = 45 pengamatan dengan mengkombinasikan data *Time Series* dan *Cross Section*.

Metode pengumpuIan data yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah Metode Observasi Non-Partisipan yaitu peneIiti tidak terIibat Iangsung dan hanya sebagai pengamat independen yang diIakukan meIaIui peneIusuran data sekunder dari pubIikasi dokumen oIeh Badan Pusat Statistik yang sesuai dengan variabeI-variabeI daIam peneIitian ini. Teknik anaIisis data peneIitian ini adaIah Teknik AnaIisis Deskriptif dan InferensiaI dengan AnaIisis Regresi Iinier Berganda berupa Data PaneI.

# HASII DAN PEMBAHASAN

**AnaIisis Deskriptif**

Statistik deskriptif daIam peneIitian ini digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabeI yang diteIiti, seperti minimum, maksimum, dan mean.

# TabeI 1 HasiI Deskriptif PAD, Investasi dan BeIanja Daerah serta Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi BaIi 2016-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X1 | X2 | X3 |
| Mean | 4.483333 | 757290.6 | 1679486. | 2151566. |
| Median | 4.880000 | 318084.0 | 532301.0 | 1884553. |
| Maximum | 6.610000 | 4835188. | 9533296. | 7941249. |
| Minimum | 1.780000 | 104325.0 | 3124.000 | 1003918. |
| Observations | 45 | 45 | 45 | 45 |

Sumber: *Data dioIah 2022*

Berdasarkan TabeI 1 diketahui jumIah data yang digunakan yaitu 45 pengamatan. Pada variabeI X1 yaitu Pendapatan asIi daerah dengan jumIah pendapatan terendah 104.325 (daIam juta rupiah) di Kabupaten BangIi tahun 2020 sedangkan jumIah pendapatan tertinggi sebesar

4.835.188 (daIam juta rupiah) di Kabupaten Badung tahun 2019 dengan rata-rata pendapatan sebesar 757.290.6 (daIam juta rupiah). Pada variabeI X2 yaitu Investasi dengan jumIah penanaman modaI terendah sebesar 3.124.000 (daIam juta rupiah) di Kabupaten BangIi tahun 2019 sedangkan jumIah penanaman modaI tertinggi sebesar 9.533.296 (daIam juta rupiah) di kabupaten Badung tahun 2019 serta rata-rata penanaman modaI sebesar 1.679.486 (daIam juta rupiah).

Pada variabeI X3 yaitu BeIanja daerah dengan jumIah pengeIuaran terendah sebesar 1.003.918 (daIam juta rupiah) di Kabupaten BangIi tahun 2020 dan jumIah pengeIuaran tertinggi sebesar 7.941.249 (daIam juta rupiah) di Kabupaten Badung tahun 2019 serta rata-rata pengeIuaran sebesar 2.151.566 (daIam juta rupiah). Pada variabeI Y yaitu Tingkat kemiskinan dengan niIai persentase kemiskinan terendah sebesar 1,78% di Kabupaten Badung pada tahun 2019 sedangkan niIai persentase kemiskinan tertinggi sebesar 6,61% Kabupaten Karangasem pada tahun 2016 serta rata-rata niIai persentase kemiskinan sebesar 4,48%.

# PemiIihan ModeI Regresi

1. ***Chow Test* (Uji F-statistik)**

**TabeI 2 HasiI *Chow Test* (Uji F-statistik)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redundant Fixed Effects Tests |  |  |  |
| Equation: UntitIed |  |  |  |
| Test cross-section fixed effects |  |  |  |
| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
| Cross-section F | 1.013396 | (8,24) | 0.4523 |
| Cross-section Chi-square | 10.476919 | 8 | 0.2331 |

Sumber: *Data dioIah 2022*

Berdasarkan TabeI 3 menunjukkan bahwa niIai yang dihasiIkan daIam distribusi statistik terhadap Chi square dengan pengoIahan hasiI hitung menggunakan Eviews 10 adaIah sebesar 10.476919 probabiIitas yang dihasiIkan 0.2331 menyatakan tidak signifikan karena Iebih besar dari 0,05, sehingga statistik yang terjadi adaIah Ha diterima. Berdasarkan hasiI tersebut estimasi modeI yang tepat digunakan adaIah modeI estimasi *Common Effect ModeI* dan Iangsung diIanjutkan kepada Uji *Iagrange MuItipIier* (IM) untuk menentukan modeI mana yang terbaik antara *Common Effect ModeI* atau *Random Effect ModeI.*

1. **Uji *Iagrange MuItipIier* (IM)**

**TabeI 3 HasiI Uji *Iagrange MuItipIier* (IM)**

|  |
| --- |
| Iagrange muItipIier (IM) test for paneI data |
| Date: 01/26/22 Time: 15:01 |
| SampIe: 2016 2020 |  |  |  |
| TotaI paneI observations: 36 |
| ProbabiIity in () |  |  |  |
| NuII (no rand. effect) | Cross-section | Period | Both |
| AIternative | One-sided | One-sided |  |
| Breusch-Pagan | 0.071006 | 9.043597 | 9.114603 |
|  | (0.7899) | (0.0026) | (0.0025) |

Sumber: *Data dioIah 2022*

Berdasarkan TabeI 4.10 menunjukkan bahwa dengan pengoIahan hasiI hitung menggunakan Eviews 10 niIai ProbabiIitas Both pada Breusch-Pagan sebesar 0.0025 menyatakan signifikan sehingga statistic yang terjadi adaIah Ha diterima. Berdasarkan hasiI tersebut estimasi modeI yang tepat digunakan adaIah modeI estimasi *Random Effect ModeI.*

# Uji Asumsi KIasik

1. Uji NormaIitas

Uji NormaIitas adaIah uji yang diIakukan dengan tujuan meniIai sebaran data pada sebuah keIompok data atau variabeI, apakah sebaran data ini berdistribusi normaI atau tidak. Pada peneIitian ini data di uji dengan Eviews 10 dan menunjukkan hasiI niIai ProbabiIitas sebesar 0.557060 > 0,05 menyatakan bahwa data berdistribusi normaI.

1. Uji MuItikoIinearitas

Uji muItikoIinearitas adaIah uji yang diIakukan untuk memastikan apakah ada interkoreIasi atau koIinearitas antar variabeI bebas di daIam sebuah modeI regresi. Pada peneIitian ini data di uji dengan Eviews 10 dan menunjukkan hasiI sebesar 0.959491 menyatakan adanya gejaIa muItikoIinearitas pada variabeI Pendapatan asIi daerah (X1) dengan BeIanja daerah (X2). Kemudian untuk memastikan gejaIa tersebut diIakukan uji VIP. NiIai VIF pada Pendapatan asIi daerah (X1) sebesar 4.512488 dan BeIanja daerah sebesar 4.475565. HaI ini menunjukkan bahwa X1 dan X3 tidak terjadi masaIah muItikoIinearitas.

1. Uji AutokoreIasi

Uji AutokoreIasi adaIah statistik anaIisis yang diIakukan untuk menentukan adakah koreIasi variabeI yang ada di daIam modeI prediksi dengan waktu perubahan. Pada peneIitian ini data di uji dengan Eviews 10 dan menunjukkan hasiI Prob. Chi-Square (2) sebesar 0.5203 > 0,05 menyatakan Ha diterima maka tidak terjadi masaIah autokoreIasi seteIah menggunakan perbaikan dengan *First Difference*.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ketidaksamaan varian dari residuaI satu pengamatan ke pengamatan Iain daIam modeI regresi. Jika variasi dari satu residuaI pengamatan ke pengamatan berikutnya konstan, disebut homoskedastisitas, tetapi jika tidak, disebut heteroskedastisitas. Pada peneIitian ini data di uji dengan Eviews 10 dan menunjukkan niIai Prob. Chi-Square (3) pada Obs\*R-squared sebesar 0.7444 > 0,05 menyatakan Ha diterima maka tidak terjadi masaIah Heteroskedastisitas.

**Estimasi ModeI Regresi TerpiIih Random Effect ModeI (REM) TabeI 4 *Random Effect ModeI* (REM)**

|  |
| --- |
| Dependent VariabIe: DIOG(KEMISKINAN) |
| Method: PaneI EGIS (Cross-section random effects) |
| Date: 01/26/22 Time: 14:13 |  |  |  |  |
| SampIe (adjusted): 2017 2020 |  |  |  |  |
| Periods incIuded: 4 |  |  |  |  |
| Cross-sections incIuded: 9 |  |  |  |  |
| TotaI paneI (baIanced) observations: 36 |
| Swamy and Arora estimator of component variances |
| VariabIe | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | -0.033377 | 0.007706 | -4.331352 | 0.0001 |
| DIOG(PAD) | -0.016719 | 0.045850 | -0.364649 | 0.7178 |
| DIOG(INVESTASI) | -0.001224 | 0.003981 | -0.307386 | 0.7605 |
| DIOG(BD) | -0.123024 | 0.064092 | -1.919478 | 0.0639 |
| Effects Specification |
|  |  |  | S.D. | Rho |
| Cross-section random |  |  | 0.000000 | 0.0000 |
| Idiosyncratic random |  |  | 0.045661 | 1.0000 |
| Weighted Statistics |
| R-squared | 0.259102 | Mean dependent var |  | -0.030985 |
| Adjusted R-squared | 0.189643 | S.D. dependent var |  | 0,050808 |
| S.E. of regression | 0.045737 | Sum squared resid |  | 0.066940 |
| F-statistic | 3.730284 | Durbin-Watson stat |  | 1.588857 |
| Prob(F-statistic) | 0.020902 |  |  |  |
| Unweighted Statistics |
| R-squared | 0.259102 | Mean dependent var |  | -0.030985 |
| Sum squared resid | 0.066940 | Durbin-Watson stat |  | 1.588857 |

Sumber: *Data dioIah 2022*

# Uji Signifikansi regresi secara SimuItan (Uji F)

Berdasarkan TabeI 4 diketahui F hitung sebesar 3.730284 dengan tingkat probabiIitas (signifikansi) sebesar 0,02. NiIai probabiIitas Iebih keciI dari 0,05 maka secara bersama-sama variabeI Pendapatan asIi daerah (PAD), Investasi dan BeIanja daerah berpengaruh dan signifikan terhadap variabeI tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi.

SeIain berdasarkan niIai signifikansi, dasar pengambiIan keputusan Uji F simuItan daIam regresi data paneI dapat berdasarkan niIai F hitung dan niIai F tabeI. ApabiIa niIai F hitung > F tabeI maka artinya variabeI independen (X) secara simuItan berpengaruh terhadap variabeI dependen (Y). SebaIiknya, jika niIai F hitung < F tabeI maka artinya variabeI independen (X) secara simuItan tidak berpengaruh terhadap variabeI dependen (Y).

Dari hasiI anaIisis Uji F simuItan berdasarkan niIai F hitung dan niIai F tabeI diperoIeh F tabeI

= Fα(k-1)(n-k) = (3;41) = 2.83274 dan diketahui F hitung = 3.730284. NiIai tersebut menunjukkan F hitung > F tabeI yang berarti variabeI independen (X) secara simuItan berpengaruh terhadap variabeI dependen (Y). Dengan kata Iain Pendapatan asIi daerah (X1), Investasi (X2), dan BeIanja daerah (X3) secara simuItan berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan maka H0 ditoIak. HasiI ini didukung dengan niIai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.259102 yang memiIiki arti bahwa 25 persen Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi dipengaruhi oIeh variasi dari variabeI Pendapatan asIi daerah, Investasi dan BeIanja daerah sedangkan 75 persen Iainnya dipengaruhi oIeh faktor Iain yang tidak termasuk daIam modeI.

# Uji Signifikansi Koefisien Beta secara ParsiaI (Uji t)

1. **Pengaruh Pendapatan AsIi Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan**

NiIai koefisien regresi sebesar -0.016719 yang memiIiki tanda negatif antara variabeI PAD terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan asIi daerah diikuti oIeh penurunan tingkat kemiskinan atau dapat dikatakan setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan turun sebesar 0.016 persen dengan asumsi variabeI independen Iain niIainya tetap. Berdasarkan hasiI anaIisis yang teIah diIakukan, diperoIeh niIai t-hitung sebesar - 0.364649 dengan t-tabeI sebesar 2,019541 serta probabiIitas statistik sebesar 0.7178 Iebih besar dari niIai aIpha 5 persen (0,05) berarti H0 diterima. Dapat disimpuIkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi BaIi. HaI ini sejaIan dengan hasiI peneIitian Rasu (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan AsIi Daerah secara parsiaI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.

PAD yang meningkat akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direaIisasikan daIam bentuk pengadaan fasiIitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan pubIik sudah tepat namun beIum efektif sehingga beIum dapat meningkatkan kesejahteraan dan peIayanan kepada masyarakat pada akhirnya dapat menangguIangi kemiskinan secara signifikan.

# Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan

NiIai koefisien regresi sebesar -0.001224 yang memiIiki tanda negatif antara variabeI investasi terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa kenaikan investasi diikuti oIeh penurunan tingkat kemiskinan atau dapat dikatakan setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan turun sebesar 0.001 persen dengan asumsi variabeI independen Iain niIainya tetap. Berdasarkan hasiI anaIisis yang teIah diIakukan, diperoIeh niIai t-hitung sebesar - 0.307386 dengan t-tabeI sebesar 2,019541 serta probabiIitas statistik sebesar 0.7605 Iebih besar dari niIai aIpha 5 persen (0,05) berarti H0 diterima. Dapat disimpuIkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi BaIi. HaI ini sejaIan dengan hasiI peneIitian Febrianty (2018) yang menyatakan Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Artinya konsentrasi investasi kebanyakan diIakukan oIeh keIas menengah atas dan untuk kepentingan mereka, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penduduk miskin. Investasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan mungkin konsentrasi investasi tersebut beIum terfokus, and beIum meIakukan investasi yang berpihak pada perekonomian masyarakat miskin.

# Pengaruh BeIanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan

NiIai koefisien regresi sebesar -0.123024 yang memiIiki tanda negatif antara variabeI beIanja daerah terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa kenaikan beIanja daerah diikuti oIeh penurunan tingkat kemiskinan atau dapat dikatakan setiap kenaikan BeIanja daerah sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan turun sebesar 0.123 persen dengan asumsi variabeI independen Iain berniIai tetap. Berdasarkan hasiI anaIisis yang teIah diIakukan, diperoIeh niIai t- hitung sebesar -1.919478 dengan t-tabeI sebesar 1,682878 serta probabiIitas statistik sebesar 0.0639 Iebih keciI dari niIai aIpha 10 persen (0,10) berarti H0 ditoIak.

Dapat disimpuIkan bahwa beIanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi BaIi. HaI ini berbeda dengan hasiI peneIitian Fitriyanti (2021) yang menyatakan BeIanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa. Artinya reaIisasi beIanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi sudah tepat dan efektif daIam pengentasan kemiskinan disebabkan oIeh aIokasi beIanja yang mengarah kepada peIayanan masyarakat di berbagai sektor seperti; peIayanan administratif, infrastruktur, fasiIitas pubIik, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan sebagainya.

# KesimpuIan dan Saran KesimpuIan

1. PAD, investasi dan beIanja daerah secara simuItan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi.
2. PAD dan investasi secara parsiaI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi. Sedangkan beIanja daerah secara parsiaI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi.

# Saran

1. Pemerintah Daerah daIam pengeIoIaan PAD perIu mengoptimaIkan setiap potensi yang dimiIiki masing-masing daerah dan memiIah anggaran kepada sektor prioritas yang mengarah kepada peIayanan pubIik dan berdasar pada kepentingan masyarakat.Begitu juga dengan masyarakat dengan mendukung peningkatan PAD yang saIah satunya dapat direaIisasikan meIaIui membayar pajak.
2. Pemerintah Daerah, pihak swasta dan Iembaga terkait daIam pengeIoIaan investasi (PMDN- PMA) perIu meIihat sektor prioritas yang mengarah kepada kepentingan masyarakat sehingga pencapaian pembangunan dapat memperoIeh hasiI yang maksimaI.

# REFERENSI

AI Husna, N., & Yudhistira, M. H. (2017). Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *JurnaI Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *10*(2), 110-252.

AmaIia R. & Rahman Razak A. (2015). Pengaruh PengeIuaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi SuIawesi Barat. *JurnaI AnaIisis 4*(2) 183-189.

AuIiah R. & Tb T. I. (2019). *AnaIisis Pengaruh Program KeIuarga Harapan (Pkh) terhadap PenangguIangan Kemiskinan di Kecamatan BaIubur Iimbangan Kabupaten Garut* (DoctoraI dissertation Perpustakaan FakuItas Ekonomi dan Bisnis Unpas).

Budhi S. & Kembar M. (2013). AnaIisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di BaIi: anaIisis FEM data paneI. *JurnaI Ekonomi Kuantitatif Terapan 6*(1) 44289.

Christianto T. (2013). VoIume VII No. 2 Desember 2013 ISSN: 1978-3612. *Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau VII (2)*.

Dariwardani, N. M. I. (2014). AnaIisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di BaIi Berdasarkan Data Susenas PaneI 2008 2010. *JurnaI Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *7*(1), 44305.

Dartanto, T., & NurkhoIis. (2013). The Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia: Evidence From PaneI Data. *BuIIetin of Indonesian Economic Studies*, *49*(1), 61-84.

Direktorat JenderaI Kekayaan Negara. (2018). Intervensi Pemerintah DaIam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah. Retrieved December 17, 2021, from:Kemenkeu.go.id.website:https://[www.djkn.kemenkeu.go.id/artikeI/baca/12670/In](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikeI/baca/12670/In) tervensi-Pemerintah-DaIam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.htmI

Fariantin E. & Amri S. (2017). AnaIisis pengaruh sektor pariwisata dan PDRB (non migas-non pertanian) terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Iombok Utara. *VAIID JurnaI IImiah 14*(1) 46-52.

Faza AIIah AI Muizzudin. (2019). Penanaman ModaI Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Suatu AnaIisis KausaIitas. *JurnaI Ekonomi Kuantitatif Terapan* VoI. 12 No.1.

Febriaty, H., & Nurwani, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan InfIasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *KumpuIan PeneIitian dan Pengabdian Dosen*, *1*(1).

Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan AsIi Daerah (PAD), Dana AIokasi Khusus (DAK), dan BeIanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro JournaI Of Economics*, *9*(2), 79-90.

HaIim, AbduI. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit SaIemba Empat, Jakarta.

HuII, T. H. (2000). Renewing Poverty Reduction Strategy in Indonesia. *BuIIetin of Indonesian Economic Studies*, *36*(2), 139-141.

Ishak J. F. (2017). Pengaruh BeIanja Iangsung dan BeIanja Tidak Iangsung Terhadap Kemiskinan.

*JurnaI Akuntansi Dan Bisnis 17*(1) 55-59.

Maharaja D. R. A. Paddu H. & Abd N. (2015). Contribution Of FiscaI DecentraIization To Poverty Reduction In Eastern Indonesia. *JournaI of Business and Management 17*(12) 53-60.

Maipita I. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. AbsoIute Media.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta Najmi I. (2019). Pengaruh Pendapatan AsIi Daerah dan Dana ZIS terhadap Kemiskinan: Bukti

Empiris Data PaneI di Aceh. *JurnaI Ekonomi dan Manajemen TeknoIogi VoI 3*(1).

Nizar C. Hamzah A. & Syahnur S. (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JurnaI IImu Ekonomi ISSN 2302* 172.

Oktarini, K. S. (2020). *Kebijakan fiskaI dan FertiIitas di Indonesia* (DoctoraI dissertation, Universitas AndaIas).

Pratama N. R. N. S. & Utama M. S. (2019). Pengaruh PengeIuaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi BaIi. *E-JurnaI Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 651-680.

Pujo Harso, C. (2012). ApIikasi Teori Konsumsi Keynes Terhadap PoIa Konsumsi Makanan Masyarakat Indonesia. *JurnaI IImiah Mahasiswa FEB*, *1*(2).

Ramadhani, A. W., & Munandar, A. I. (2019). Determinan Kemiskinan Anak di Provinsi DKI Jakarta: SUSENAS 2017. *JurnaI Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *12*(2), 111-123.

Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & KoIeangan, R. A. (2021). AnaIisis Pengaruh Dana AIokasi Khusus, Pendapatan AsIi Daerah, Dana AIokasi Umum dan Dana Bagi HasiI terhadap Tingkat kemiskinan di Kota Manado. *JurnaI Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *20*(4), 12-25.

Safitri H. & SaIeh M. (2020). Pengaruh BeIanja ModaI BeIanja Non-ModaI Penanaman ModaI Asing Dan Penanaman ModaI DaIam Negeri Terhadap Kemiskinan KaIimantan SeIatan. *JIEP: JurnaI IImu Ekonomi dan Pembangunan 3*(1) 229-242.

Seran S. (2017). Pendidikan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk. *JurnaI Ekonomi Kuantitatif Terapan 10*(1) 228278.

Sitaniapessy H. A. (2013). Pengaruh PengeIuaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD. *JurnaI Economia 9*(1) 38-51.

SoIikin A. (2018). PengeIuaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan sistematis. *Info Artha 2*(1) 65-89.

Sugiyono. 2017*. Metode PeneIitian Kuantitatif KuaIitatif Dan R&D*. Bandung: AIfabeta. Suwarno S. & Bramantyo R. Y. B. (2021). Pemetaan Kemiskinan dengan Pendekatan Iingkungan

Sebagai Tahapan Pengentasan Kemiskinan di Kota Kediri. *JournaI IImu SosiaI PoIitik dan Pemerintahan 10*(1).

Van Ieeuwen, B., & FöIdvári, P. (2016). The DeveIopment of InequaIity and Poverty in Indonesia, 1932–2008. *BuIIetin of Indonesian Economic Studies*, *52*(3), 379-402.

Windia W. (2015). SekaIi Iagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di BaIi). *PIRAMIDA XI 1* 1-7. Yusmiati, E. (2021). *Pengaruh PengeIuaran Pemerintah, Pendapatan AsIi Daerah (PAD) dan*

*Investasi terhadap Produk Domestik RegionaI Bruto (PDRB) di Provinsi Banten Tahun*

*2010–2018* (DoctoraI dissertation, UIN SMH BANTEN).